

**Naskah Publikasi Skripsi**

**KOMPARASI GAYA KEPEMIMPINAN PRESIDEN SUSILO BAMBANG  
YUDHOYONO DAN JOKO WIDODO DALAM PERSPEKTIF  
KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**CICA MIRANDA**

**20150520145**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2019**

**NASKAH PUBLIKASI**

**KOMPARASI GAYA KEPEMIMPINAN PRESIDEN SUSILO  
BAMBANG YUDHOYONO DAN JOKO WIDODO DALAM  
PERSPEKTIF KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS**

Oleh:

CICA MIRANDA  
20150520145

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah  
penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing

  
Dr. Suswanta, M.Si

NIP: 19670812199403 1 003

Mengetahui,

  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik  
  
Dr. Tug Purwaningsih, S.IP., M.Si  
NIK: 19690822199603 163 038

  
Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan  
  
Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si  
NIK: 19660828199403 163 025

## ABSTRAK

Seperti yang diketahui bahwa Indonesia menerapkan Sistem Demokrasi. Pada tahun 2004 untuk pertama kalinya Indonesia melakukan pemilihan presiden secara langsung, yang kemudian dilakukan kembali pada tahun 2009 dan 2014. Pemilihan umum merupakan bentuk dari pesta demokrasi. Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo adalah pemimpin yang lahir dari pesta demokrasi, kedua pemimpin ini dipilih langsung oleh rakyat Indonesia melalui pemilihan umum presiden. Salah satu ciri dari demokrasi adalah adanya keterlibatan rakyat atau partisipasi.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan gaya kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo dalam perspektif kepemimpinan demokratis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Analisis dan pengumpulan data menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara yang didapatkan dilapangan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan antara gaya kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Susilo Bambang Yudhoyono memiliki gaya kepemimpinan yang didasarkan pada kepribadian beliau sendiri. Dan memiliki ciri kepemimpinan demokratis, beliau sangat menjunjung tinggi dalam hal kebebasan berpendapat. Strategi kepemimpinan beliau dikenal dengan istilah “Gelombang Bocor”. Diibaratkan sebuah gelembung, semakin keatas maka akan pecah dengan sendirinya. Siapapun diperbolehkan mengkritik pemerintah, sampai capek dengan sendirinya dan tidak dibatasi dalam penyampaian kritikan. Sedangkan Joko Widodo beliau mengadopsi dari gaya kepemimpinan Jawa “*Ing Ngarsa Sung Talada*” atau lebih kita kenal dengan istilah “Tut Wuri Handayani”. Yang harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Berbeda halnya dengan Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo kurang menjunjung tinggi dalam hal kebebasan berpendapat. Dalam beberapa kasus penyampaian pendapat melalui media sosial dalam bentuk “meme” selalu terkena UU IT, padahal dalam sistem demokrasi kebebasan berpendapat sangatlah dijunjung tinggi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan ciri dari kepemimpinan demokratis, yaitu dengan menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Sedangkan presiden Joko Widodo belum melakukan ciri dari kepemimpinan demokratis, karena kurangnya menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Adapun salah satu ciri dari sistem demokrasi adalah kebebasan dalam berpendapat.

**Kata Kunci : Kepemimpinan, Demokrasi, Presiden, dan SBY & Jokowi**

## **PENDAHULUAN**

Pada tahun 2004 untuk pertama kalinya Indonesia melakukan pemilihan umum presiden secara langsung, pesta demokrasi ini terjadi sejak adanya reformasi di Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden Indonesia pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia dalam pilpres 2004 dengan wakil terpilihnya Jusuf Kalla. Setelah Susilo Bambang Yudhoyono menjabat selama dua periode, pada pilpres 2014 terpilih Joko Widodo sebagai presiden Indonesia dengan wakil yang sama yaitu Jusuf Kalla. Kedua pemimpin ini memiliki perolehan suara yang cukup tinggi dalam pemilihan umum presiden. Dimana dalam pilpres 2004 putaran kedua pasangan SBY-JK memperoleh sebanyak 60,62% suara sedangkan dalam pilpres 2014 pasangan Jokowi-JK memperoleh sebanyak 53,15% suara (DetikNews.com, 2014).

Dibawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia aktif dalam berbagai organisasi internasional hingga konverensi tingkat dunia. Dengan pembuktian antara lain menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan SEA GAMES XXIV di Palembang pada tahun 2011 dan sebagai tuan rumah perhelatan Miss World 2013 di Bali pada tahun 2013. Kesamaan lain antara kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo adalah di era kepemimpinan Joko Widodo, Indonesia juga berperan aktif dalam organisasi internasional. Beliau berhasil mengenalkan kembali nama Indonesia di kanca internasional. Indonesia kembali menjadi tuan rumah penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII di Palembang dan Jakarta pada Agustus 2018 (Sikumbang, 2015).

Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono politik luar negeri Indonesia menerapkan paham *A Million Friends Zero Enemy* dengan merangkul teman sebanyak-banyaknya dan meminimalisir permusuhan. Sedangkan pada masa kepemimpinan Joko Widodo politik luar negeri Indonesia menerapkan paham politik bebas aktif. Dibawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono Indonesia aktif dalam penyelesaian konflik etnis Rohingya dan Rakhine di Myanmar, dengan mengedepankan metode penyelesaian konflik secara damai dan tetap memegang prinsip non intervensi yang dilakukan secara bilateral maupun multilateral bersama Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) (Ardani, 2015). Sedangkan pada masa kepemimpinan Joko Widodo Indonesia aktif dalam penyelesaian konflik Laut Cina Selatan. Indonesia berperan sebagai tonggak atau motor penggerak dan menjadi salah satu jembatan dari terbentuknya forum-forum yang diadakan oleh ASEAN. Adapun tujuan diadakannya forum tersebut agar dapat mereda dan akan muncul solusi atas penyelesaian konflik Laut Cina Selatan (Saragih, 2018).

Persamaan lain antara kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo adalah dimana Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo sama-sama menerapkan dan mengadakan program-program yang pro terhadap rakyat. Program yang diterapkan oleh Joko Widodo antara lain: Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Sedangkan untuk program-program yang diterapkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono antara lain: Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beasiswa, Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

(PNPM Mandiri), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM (Suryawati, 2014).

Berawal dari adanya beberapa kesamaan antara kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo inilah yang pada akhirnya membuat penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana perbandingan gaya kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo dalam perspektif kepemimpinan demokratis, serta untuk melengkapi hasil dari penelitian sebelumnya yang sejenis atau serupa dengan topik yang sama.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Menurut (Salma Nisrina dan Nila Nurlimah, 2017) dalam penelitian “Model Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Dalam Bingkai Buku “Harus Bisa, Seni Memimpin Ala SBY”. SBY memiliki tipe kepemimpinan yang kontingensi. Hal ini dibuktikan dan didukung dengan adanya dua faktor penting, yaitu gaya yang berorientasi dengan tugas dan gaya yang berorientasi dengan hubungan. SBY melihat situasi berdasarkan hubungan pemimpin dan anggota dengan struktur tugas. SBY adalah salah satu pemimpin yang sukses, SBY mampu menjalankan pemerintahan negara selama dua periode. Seperti halnya yang dituliskan Dr. Dino Patti Djalal dalam bukunya “Untuk Mengetahui Bagaimana Keharusan Pemimpin Dalam Negara Indonesia”, beliau menjelaskan bahwa sikap, sifat, serta cara kepemimpinan SBY adalah salah satu gaya kepemimpinan yang cocok diterapkan di Indonesia. SBY memiliki kepribadian yang

tegas, pemikir, detail, dan teliti dalam menyelesaikan setiap permasalahan dan siap membuat solusi dan keputusan.

Menurut (Suryawati, 2014) dalam penelitian “Implementasi Kebijakan Joko Widodo Melalui Program KJS dan KJP (Ditinjau dari Perspektif Komunikasi Pembangunan)”. Kebijakan yang diambil oleh presiden Jokowi mendapatkan respon positif dari masyarakat Indonesia, baik dari masyarakat yang sudah mendapatkan KJS dan KJP ataupun masyarakat yang belum mendapatkan. Dalam tahun pertama kebijakan ini belum sepenuhnya menyentuh masyarakat miskin di Jakarta. Faktor utama yang menjadi penghambat atau kendala adalah terkait dengan kepemilikan KTP dan KK dari warga miskin di Jakarta.

Menurut (Utami, 2013) dalam penelitian “Gaya Kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo Berdasarkan Prinsip Tata Kelola Kepemimpinan Yang Baik”. Konsep dari GCG sendiri akan cocok jika diterapkan dalam lingkungan birokrasi pemerintahan, sektor swasta atau perusahaan swasta, dan lain sebagainya. Konsep GCG memiliki tujuan untuk menciptakan suatu pemerintahan yang bersih. Dalam kepemimpinannya Jokowi menerapkan konsep GCG secara sungguh-sungguh. Konsep GCG yang diterapkan antara lain *elemen participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability, and strategic vision*.

Menurut (A.R, 2013) dalam penelitian “Penomena Kepemimpinan Politik Jokowi”. Kepemimpinan transformasional yang diterapkan oleh Jokowi dapat dilihat atas kemampuan dari sosok Jokowi sendiri yang dimana membawa birokrasi pemerintahan yang berorientasi kepada pelayanan terhadap masyarakat. Dalam usaha mendapatkan jabatan politik, Jokowi melalui kompetisi yang diraih dengan melalui cara-cara yang legal dan bersih atas dari politik uang. Walaupun dengan kemenangan Jokowi telah mengalahkan lawannya, namun Jokowi tetap menggunakan kekuasaan bukan untuk mempertahankan kekuasaannya itu sendiri, melainkan digunakan untuk tetap melayani rakyat dan masyarakat.

Menurut (Sutiknyo, 2013) dalam penelitian “Kebijakan Politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Terhadap Kasus KPK Vs POLRI Dalam Perspektif Siyashah (Studi Kasus Susno Duaji dan Bibit Chandra)”. Adapun langkah atau kebijakan yang diambil oleh SBY untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi pada internal penegak hukum di Indonesia yaitu kasus permusuhan antara KPK dengan institusi POLRI. Menfokuskan kepada aspek siasat dan intrik politik yang dilakukan oleh elite politik pemerintahan Indonesia untuk melakukan lobi-lobi yang akan saling memberikan dukungan antara satu dengan yang lainnya. Kebijakan yang dilakukan oleh SBY adalah bersikap netral tanpa memihak kepada salah satu pihak yang sedang bersengketa diantara institusi penegak hukum Indonesia. Akan tetapi, juga tidak lepas tangan dengan membiarkan kegaduhan terus berlanjut.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sesuai dengan sifat dan karakter permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat memahami suatu peristiwa yang terjadi pada subjek penelitian dalam konteks yang ilmiah. Konteks khusus yang dimaksud adalah bagaimana perbandingan gaya kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo dalam perspektif kepemimpinan demokratis. Adapun data yang digunakan ada data primer dan data sekunder. Pengumpulan data hasil dari wawancara serta observasi lapangan melalui DPD Partai Demokrat DIY, DPD Partai PDIP DIY, serta pengumpulan data-data visual melalui dokumentasi baik berupa tulisan maupun gambar-gambar yang dibutuhkan.

## **LANDASAN TEORI**

### **1. Kepemimpinan**

Kepemimpinan merupakan pemimpin yang mengarahkan serta mempengaruhi kegiatan dari para anggota kelompok. Kepemimpinan dalam arti lain merupakan unsur yang fundamental dalam menghadapi gaya dan perilaku seseorang, hal tersebut memiliki tujuan untuk agar bawahan mampu serta mau patuh terhadap pimpinannya. Merupakan suatu hal yang fundamental jika seseorang pemimpin memiliki keterampilan untuk mempengaruhi orang yang

dipimpinnya dalam mewujudkan kepemimpinan yang efektif (Mangkuprawira, 2009).

Menurut (Hasibuan, 2001) merumuskan pengertian kepemimpinan adalah sebagai berikut :

1. Kepemimpinan pada dasarnya menekankan adanya hubungan antara dua pihak, yaitu adanya pemimpin dan ada yang dipimpin atau pengikut.
2. Terjadinya pola interaksi diantara pemimpin dan yang dipimpin.
3. Pada pola interaksi yang terjadi antara pemimpin dengan yang dipimpin, pemimpin mempengaruhi perilaku para pengikut.
4. Proses pemimpin mempengaruhi pengikut dilakukan dengan tujuan agar pengikut melakukan tindakan-tindakan untuk mampu mencapai tujuan yang telah disepakati bersama oleh pemimpin dan pengikut.
5. Tujuan yang ingin dicapai oleh pemimpin dan pengikutnya merupakan tujuan bersama dari organisasi.

Berdasarkan kelima poin diatas, (Hasibuan, 2001) menyimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan pola interaksi yang terjadi antara pimpinan formal dengan para pengikutnya atau bawahannya untuk melakukan tindakan-tindakan dalam mencapai tujuan kelompok yang diinginkan atau yang telah disepakati bersama antara pimpinan dan bawahannya.

## **2. Gaya Kepemimpinan**

Gaya kepemimpinan adalah suatu sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menghadapi bawahannya, mengatur suatu sistem operasional organisasi, menjalankan serta mengawal kebijakan, dan juga menyelesaikan masalah baik secara internal maupun eksternal. Gaya kepemimpinan merupakan ketika seorang pemimpin memiliki sekumpulan ciri khas yang digunakan pemimpin secara terlihat maupun tidak yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi bawahannya agar terwujudnya tujuan bersama yang telah disepakati. Gaya kepemimpinan juga dapat ditunjukkan dengan perilaku pemimpin saat berkomunikasi, memberikan suatu informasi serta perintah kepada bawahannya (Rivai, 2003).

Menurut (Rivai, 2003) gaya kepemimpinan memiliki tiga pola dasar yaitu sebagai berikut:

1. Gaya kepemimpinan yang berpola kepada kepentingan atas pelaksanaan tugas.
2. Gaya kepemimpinan yang berpola kepada pelaksanaan hubungan kerja sama.
3. Gaya kepemimpinan yang berpola kepada kepentingan atas hasil yang dicapai.

## **3. Presiden**

Presiden dalam bahasa Latin disebut *Presidere* yang merupakan berasal dari kata *prae* yang memiliki arti di depan dan kata *sedere* yang memiliki arti

diduduki. Pada saat ini presiden selalu dikenal dengan sebutan kepala negara. Di negara Indonesia seorang presiden berperan sebagai kepala pemerintahan yang mana dalam Undang-Undang Dasar, berhak untuk mengajukan suatu usulan rancangan Undang-Undang kepada DPR, menetapkan dan peraturannya dengan tujuan untuk menjalankan suatu undang-undang agar berjalan sebagaimana mestinya. Sejak terjadinya reformasi, rakyat Indonesia berhak untuk memilih presiden dan wakil presiden dengan melalui pemilihan umum presiden. Artinya di Indonesia, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia. Masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia selama lima tahun untuk satu kali periode. Selanjutnya jika ingin melanjutkan kedua periode maka harus melalui proses pemilihan langsung kembali, seperti yang dilakukan sebelumnya pada periode pertama (Assiddiqie, 2004).

## **HASIL PEMBAHASAN**

Berdasarkan teori di atas, penulis merujuk pada indikator yang terdapat dalam teori Veithzal Rivai dimana gaya kepemimpinan demokratis dapat diukur dengan indikator sebagai berikut :

### **1. Berperan Sebagai Koordinator**

Adanya perbedaan antara gaya kepemimpinan antara presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

memiliki ciri khas sendiri dalam memimpin, gaya kepemimpinan beliau adalah cerminan dari kepribadian beliau. Sedangkan presiden Joko Widodo dalam memimpin beliau mengadopsi gaya kepemimpinan Jawa “*Ing Ngarsa Sung Talada*” atau lebih kita kenal dengan istilah “Tut Wuri Handayani”.

Sedangkan untuk kesamaan antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo adalah kedua pemimpin ini dalam menjalankan pemerintahannya telah menerapkan sistem desentralisasi. Masing-Masing daerah atau provinsi diberikan kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Salah satunya adalah pada zaman Susilo Bambang Yudhoyono dikeluarkannya PP Nomor 23 Tahun 2011 untuk peningkatan hubungan pusat dan daerah (didasarkan pada hasil wawancara bersama bapak Imam Setiyadi). Secara konseptual kedua pemimpin ini melaksanakan perannya sebagai koordinator, hanya saja dalam sisi pencapaian hasil yang diharapkan belum sesuai dengan tujuan awal. Hal ini diakibatkan karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga hasil yang didapatkan belum maksimal.

## **2. Menggunakan Pendekatan Holistik dan Integralistik**

Kedua pemimpin ini memiliki kesamaan yaitu berfokus pada perbaikan pendidikan, dan terjadi peningkatan atas perkembangan pada bidang pendidikan setiap tahunnya. Perbedaan dari kedua pemimpin ini adalah pada format yang dipilih. Jika pada kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono alokasi untuk dana pendidikan diberikan kepada pihak sekolah secara langsung yang lebih kita kenal dengan istilah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sedangkan pada

kepemimpinan Joko Widodo alokasi dana pendidikan diberikan secara langsung kepada siswa yang bersangkutan yang disebut dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) (Meiliana, 2018).

Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Adapun tujuan dari program ini adalah untuk mewujudkan program wajib belajar dua belas tahun, dimana program wajib belajar dua belas tahun merupakan program lanjutan dari pemerintahan sebelumnya yaitu wajib belajar sembilan tahun. Dengan adanya dana yang diberikan kepada siswa diharapkan bantuan dana ini dapat menjadi solusi untuk anak-anak Indonesia agar terus dapat melanjutkan pendidikannya.

### **3. Memperlakukan Manusia Dengan Cara Yang Manusiawi**

Suatu negara tidak hanya menyelesaikan permasalahan domestik saja namun juga membantu dalam permasalahan yang terjadi diranah internasional. Terdapat beberapa perbedaan pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhyono dan Joko Widodo. Politik luar negeri masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono lebih kepada *All Directions Foreign Policy* (politik luar negeri segala arah) dengan menerapkan paham *A Million Friends Zero Enemy*. Artinya adalah beliau menerapkan paham untuk merangkul teman sebanyak-banyaknya serta meminimalisir adanya permusuhan. Sedangkan Joko Widodo lebih kepada penerapan paham politik luar negeri bebas aktif. Selain perbedaan paham yang diterapkan dari kedua pemimpin ini, perbedaan lainnya adalah fokus pada kasus yang ditangani. Pada masa pemerintahannya, Susilo Bambang

Yudhoyono lebih menfokuskan pada kasus konflik yang terjadi antara Rohingya dan Rakhine di Myanmar. Langkah yang dilakukan beliau dalam membantu penyelesaian konflik ini adalah dengan mengedepankan metode penyelesaian secara damai dengan cara yang digunakan adalah *soft diplomasi* dan kerja sama dengan tetap memegang prinsip non intervensi. Adapun cara yang dilakukan adalah dengan cara bilateral ataupun multilateral dengan melibatkan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Sedangkan Joko Widodo berfokus pada penyelesaian konflik Laut Cina Selatan. Indonesia menjadi negara penggagas atas terbukanya kerjasama antara negara-negara yang terlibat aktif dalam penyelesaian konflik Laut Cina Selatan (Saragih, 2018).

Paham yang diterapkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono memiliki kesamaan pada paham yang diterapkan oleh Recep Tayyip Erdogan. Paham yang diterapkan oleh beliau adalah Al-Amq Al Istratijii (strategi politik intensif) dengan sikap keterbukaan serta politik *soft power diplomasi*. Adapun kasus yang ditangani hampir serupa, yaitu kasus yang terjadi didaerah kawasannya. Recep Tayyip Erdogan berfokus pada penyelesaian konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina dimana daerah ini masuk dalam kawasan daerah Timur Tengah. Hanya saja yang menjadi pembeda adalah pada wilayah yang ditanganinya. Susilo Bambang Yudhoyono berfokus di Myanmar yang merupakan area kawasan Asia Tenggara, sedangkan Recep Tayyip Erdogan pada area kawasan Timur Tengah. Kesamaan lainnya antara kedua pemimpin ini adalah pada kasus

yang ditangani, dimana kasus yang ditangani adalah berfokus pada konflik yang melibatkan umat muslim. Yang tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia dan Turki merupakan negara yang memiliki penduduk muslim yang banyak (Wicaksono, 2016).

#### **4. Menindaklanjuti Bawahan Yang Melanggar**

Terdapat beberapa hal yang menjadi pembeda diantara kedua pemimpin ini, Pertama adalah masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso melalui surat No.PW01/0054/DPR-RI/1/2011 mengajukan satu usulan untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Namun usulan tersebut ditolak oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau lebih memilih untuk melakukan peningkatan kinerja dari KPK itu sendiri dengan tujuan agar kinerja KPK menjadi lebih baik lagi, ketimbang harus menghabiskan waktu dan juga energi yang digunakan hanya untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Berbeda halnya dengan yang dilakukan pada masa kepemimpinan Joko Widodo. Beliau lebih kepada sebaliknya, hal ini didukung oleh yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dimana beliau mengatakan bahwa gagasan awal adanya wacana untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK berawal dari pemerintah. Lalu usulan tersebut disetujui di paripurna DPR RI. Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) muncul dengan adanya empat poin usulan terhadap revisi undang-undang. Jika pemerintah menolak untuk melakukan revisi, mungkinkah adanya empat poin usulan tersebut. Walaupun pada akhirnya Joko Widodo menolak

untuk merevisi Undang-Undang KPK hal ini tidak lain terjadi karena adanya desakan dari publik kepada beliau (Khamelia, 2018).

Kedua adalah pada masa pemerintahannya, Susilo Bambang Yudhoyono menolak adanya pemberian remisi kepada koruptor. Yang mana tidak satupun seorang koruptor diberikan remisi, hal ini didukung dengan dikeluarkannya PP Nomor 99 Tahun 2012 yang lebih memperketat terhadap pemberian remisi. Berbeda halnya dengan Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo lebih kepada sebaliknya. Dimasa kepemimpinannya koruptor diberikan remisi, hal ini didasarkan dengan alasan hak asasi manusia. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan tugas dari KPK itu sendiri. Adanya pemberian remisi ini tidak akan memberikan efek jera yang signifikan. Dan bahkan jika remisi ini selalu diberikan secara berulang kali kepada para koruptor maka akan sangat bertentangan dari tugas KPK itu sendiri (Thayib, 2017).

## **5. Mendengarkan Pendapat, Saran, dan Kritikan**

Perbedaan antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo adalah, jika pada pamerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sangat menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Setiap siapapun yang ingin mengkritik diperbolehkan hingga capek dengan sendirinya, berbeda halnya pada pemerintahan Joko Widodo kurang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Dalam beberapa kasus penyampaian kritikan melalui sosial media dalam bentuk “meme” selalu terkena UU IT. Dan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono adanya kebijakan kenaikan harga BBM terlebih dahulu disampaikan kepada

masyarakat, dengan demikian paling tidak masyarakat bisa mengantisipasi dampak yang akan ditimbulkan atas kebijakan tersebut. Sedangkan pada masa pemerintahan Joko Widodo, penyampaian informasi akan kenaikan harga BBM diinformasikan hanya dalam waktu beberapa jam saja sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

#### **6. Memberikan Penghargaan Kepada Yang Berprestasi**

Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo telah banyak memberikan penghargaan kepada para bawahannya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dari apresiasi beliau kepada para bawahannya. Penghargaan tersebut dinilai atas dasar kinerja para bawahannya atas pengabdianya kepada masyarakat Indonesia. Karena telah dianggap memiliki kontribusi yang lebih dalam menjalankan tugasnya membantu pemerintahan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rivai dalam teori kepemimpinan, bahwa salah satu ciri dari pemimpin yang demokratis adalah akan selalu memberikan penghargaan kepada para bawahannya yang memiliki prestasi.

## **KESIMPULAN**

1. Susilo Bambang Yudhoyono memiliki gaya kepemimpinan yang mencerminkan sikap dan kepribadian beliau. Sedangkan Joko Widodo mengadopsi gaya kepemimpinan jawa '*Ing Ngara Sung Talada*' atau lebih dikenal dengan istilah "Tut Wuri Handayani".
2. SBY dan Jokowi berfokus pada peningkatan dan perkembangan pendidikan hanya saja format yang dipilih keduanya berbeda (antara BOS dan KIP).
3. SBY lebih berfokus pada penyelesaian konflik Rohingya dan Rakhine di Myanmar. Sedangkan Jokowi lebih berfokus pada penyelesaian konflik Laut Cina Selatan.
4. SBY menolak untuk melakukan revisi UU KPK dan penolakan pemberian remisi kepada koruptor. Sedangkan Jokowi awalnya memilih untuk melakukan revisi UU KPK (walaupun akhirnya menolak) dan memilih untuk memberikan remisi kepada koruptor.
5. SBY menjunjung tinggi kebebasan berpendapat sedangkan Jokowi kurang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat.
6. SBY dan Jokowi sama-sama memberikan penghargaan kepada para bawahan yang memiliki prestasi.

## **SARAN**

1. Pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, akan tetapi juga harus berfokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM), dan keduanya harus berbanding lurus.
2. Pemerintah harus lebih berfokus pada peningkatan kualitas kinerja KPK dan tidak memberikan remisi kepada koruptor karena hal tersebut bertentangan dengan tugas KPK itu sendiri serta kinerja dari KPK akan menjadi melemah.
3. Seharusnya sebelum menetapkan kenaikan harga BBM, pemerintah memberikan informasi sebelumnya. Dengan demikian setidaknya masyarakat dapat mengantisipasi dampak yang akan terjadi.
4. Penelitian ini akan lebih menarik dan lebih mendalam lagi pembahasannya, jika dilanjutkan kembali oleh peneliti selanjutnya dengan topik penelitian yang sejenis agar lebih mendalami perbandingan dan perbedaan kebijakan yang diambil pada masa presiden SBY dan Jokowi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardani, F. A. (2015). Kebijakan Indonesia Dalam Membantu Penyelesaian Konflik Antara Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar (Studi Karakter Kepribadian Susilo Bambang Yudhoyono). *Journal of International Relations* .
- Assiddiqie, P. D. (2004). *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: UII Press.
- DetikNews.com. (2014). *Melihat Perbandingan Pilpres 2004, 2009, dan 2014*. Jakarta : Detik News.
- Hasibuan, M. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengertian Dasar, Pengertian, dan Masalah* . Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Khamelia. (2018). *Ini Daftar 7 Menteri Era Jokowi dan SBY Yang Tersandung Korupsi* . Belitung: Pos Belitung.
- Mangkuprawira, T. S. (2009). *Horison Bisnis, Manajemen, dan Sumber Daya Manusia* . Bogor: ITB Press.
- Meiliana, D. (2018). *Presiden Jokowi Bagikan Kartu Indonesia Pintar Kepada Pelajar* . Jakarta: Kompas News.
- Rivai, V. (2003). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Salma Nisrina dan Nila Nurlimah. (2017). Model Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Bingkai Buku "Harus Bisa, Seni Memimpin Ala SBY". *Jurnalistik*.
- Saragih, H. M. (2018). Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Konflik Laut Cina Selatan . *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* .

- Sikumbang, Y. (2015). *Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap ASEAN* . Jakarta : Universitas Kristen Indonesia .
- Suryawati, I. (2014). Implementasi Kebijakan Joko Widodo Melalui Program KJS dan KJP (Ditinjau dari Perspektif Komunikasi Pembangunan). *Jurnal Komunikasi*.
- Sutiknyo. (2013). Kebijakan Politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Terhadap Kasus KPK Vs POLRI Dalam Perspektif Siyasa ((Studi Kasus Susno Duaji dan Bibit Chandra). *Skripsi*.
- Thayib, R. (2017). *Pemberantasan Korupsi Antara SBY dan Jokowi* . Jakarta : Politik Today .
- Utami, S. S. (2013). Gaya Kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo Berdasarkan Prinsip Tata Kelola Kepemimpinan Yang Baik (GCG). *Jurnal Liquidity*.
- Wicaksono, M. S. (2016). *Politik Luar Negeri Turki Terhadap Konflik Israel-Palestina di Era Kepemimpinan Erdogan* . Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.